

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu pesat telah mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi di berbagai sektor kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi tersebut. Seiring waktu, teknologi tidak hanya digunakan dalam sektor industri dan bisnis, namun juga mulai merambah ke sektor pemerintahan. Pemerintah sebagai pengelola negara dituntut untuk mampu mengikuti perubahan zaman dan menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Hal ini melatarbelakangi lahirnya konsep *e-government* (*electronic government*).

E-government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan interaksi dengan masyarakat, pelaku bisnis, maupun antarlembaga pemerintah. Tujuan utama dari *e-government* adalah menciptakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan, serta memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Penerapan *e-government* menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang juga mendukung terbentuknya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).

Dalam mendukung implementasi *e-government* secara nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Instruksi ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *e-government* diharapkan mampu mewujudkan perubahan menyeluruh pada sistem manajemen dan proses kerja di instansi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dua aktivitas utama menjadi fokus dalam kebijakan ini, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen kerja secara elektronik; serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik

yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Selain dukungan melalui Inpres, payung hukum lain yang memperkuat implementasi *e-government* di daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam hal inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang gerak lebih luas untuk merancang dan mengembangkan layanan publik digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan *e-government* di tingkat daerah dapat dilihat dari inisiatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang mengembangkan sebuah sistem informasi aplikasi pencari kerja “Siap Kerja” dengan website Bursa Kerja untuk mempermudah layanan ketenagakerjaan.

Gambar 1. 1 Data Pencaker Kabupaten Kebumen Tahun 2025



Sumber : Bursa Kerja Kabupaten Kebumen

Pengembangan Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Pencari Kerja “Siap Kerja” berasal dari kebutuhan akan sistem yang dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan data pencari kerja, pengurusan Kartu AK-I (kartu kuning), serta penyediaan informasi lowongan pekerjaan. Langkah ini sejalan dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan teknologi informasi demi kemajuan bersama. Sebelum adanya sistem ini, seluruh proses pelayanan dilakukan secara manual. Masyarakat yang ingin

mendaftar sebagai pencari kerja harus datang langsung ke kantor Disnaker, mengisi formulir fisik, dan menunggu proses pencetakan kartu yang bisa memakan waktu sehari-hari. Hal ini tentunya tidak efisien dan menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan atau desa yang jauh dari pusat kota. Selain itu, keterbatasan petugas dan kapasitas pelayanan juga sering menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan masyarakat secara cepat.

Melalui inovasi digital berbasis *e-government*, Disnakertrans Kabupaten Kebumen mengembangkan aplikasi “Siap Kerja” yang dapat diakses secara daring. Aplikasi ini memungkinkan pencari kerja untuk melakukan pendaftaran secara online, mengunggah dokumen pribadi, melihat daftar lowongan kerja terkini, dan mencetak Kartu AK-1 setelah diverifikasi. Hal ini tentunya sangat memudahkan proses, mengurangi antrian, dan mempercepat layanan. Tidak hanya itu, perusahaan atau pemberi kerja juga dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengunggah informasi lowongan pekerjaan dan mengakses data pencari kerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai platform yang menghubungkan pencari kerja dan penyedia kerja secara langsung dan terintegrasi.

Penerapan sistem ini membawa banyak manfaat. Pertama, dari sisi efisiensi, waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk mengurus kartu kuning kini jauh lebih singkat dan terjangkau. Kedua, sistem ini meningkatkan transparansi karena seluruh data tercatat dan tersimpan secara digital. Ketiga, ketersediaan data secara real-time membantu pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis data terkait ketenagakerjaan. Keempat, kualitas pelayanan publik meningkat karena sistem mampu bekerja secara otomatis, cepat, dan minim kesalahan. Kelima, akses layanan menjadi lebih inklusif karena masyarakat dari berbagai wilayah, bahkan yang jauh dari pusat kota, tetap dapat mengakses layanan melalui internet. Namun demikian, implementasi sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital masyarakat. Tidak semua masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau dari daerah terpencil, memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan yang masif agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Tantangan lainnya adalah infrastruktur jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten

Kebumen. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas cakupan jaringan, khususnya di daerah pelosok. Selain itu, Disnaker juga memerlukan tenaga teknis dan SDM yang kompeten dalam mengelola sistem, memberikan bantuan teknis kepada pengguna, serta melakukan pemeliharaan dan pengembangan berkala pada aplikasi.

Secara keseluruhan, pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pencari Kerja “Siap Kerja” merupakan langkah strategis yang sejalan dengan semangat transformasi digital dan implementasi e-government. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengurangan angka pengangguran melalui penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan terus berkembang dengan penambahan fitur yang lebih interaktif, integrasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja telah membuktikan bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan dukungan teknologi, pelayanan publik dapat diubah menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan penyedia teknologi. Transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang harus terus disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu, keberadaan e-government tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi benar-benar menjadi solusi dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan dari Inovasi E-govenrment Sistem Aplikasi Pencari Kerja (Siap Kerja) Disnaker Kabupaten Kebumen ?
2. Apa saja hambatan yang dialami Disnaker Kabupaten Kebumen dalam menerapkan inovasi Siap Kerja ?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan inovasi e-government Sistem Informasi Aplikasi Pencari Kerja berupa bursa kerja yang di laksanakan oleh Disnaker Kabupaten Kebumen sehingga jika ada kekurangan ataupun masukan dari penelitian dapat dikaji ulang oleh pemerintah terkait
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang selama pelaksanaan dialami oleh Disnaker Kabupaten Kebumen dan Pencari Kerja yang menggunakan Sistem Informasi Siap Kerja berupa Bursa Kerja sehingga pemerintah mampu memperbaiki sistem yang bekerja dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Teoritis dan Praktis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi yang signifikan seperti peningkatan fitur dan layanan digital pada Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Pencari Kerja (Siap Kerja) Disnaker Kebumen seperti peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial agar menjalankan pemerintahan dengan berbasis Digital sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi Peraturan pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 25 Tahun 2009 serta mampu memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Aparatur untuk mencapai rencana strategis dari Renstra Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen tahun 2022-2026.

1.5.Sistematika Bab

Penyajian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan serta menunjukkan penyelesaian tugas yang sistematis. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab

BAB II. Tinjauan Pustaka yang berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian (jika ada)

BAB III. Metodologi Penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan teknis analisis data serta variable penelitian sesuai kebutuhan penelitian

BAB IV. Hasil dan pembahasan yang menguraikan hasil analisis dan bukti bukti yang ditemukan dari permasalahan penelitian dengan teori dan/atau konsep dan/atau hipotesis serta metode-metode yang digunakan

BAB V. Penutup yang menyimpulkan argumentasi dan/atau saran serta agenda penelitian lanjutan yang penting dilakukan/dikembangkan

